

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan/penyesuaian kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2017, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 untuk keempat kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah ...

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
 35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
 36. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota


Langsa Tahun 2017 Nomor 647) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 573) diubah untuk ketiga kalinya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, R.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 3 Agustus 2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR ***

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PER SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	SATUAN	HARGA		JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENDAPATAN				990,122,083,465				991,227,011,708	1,104,928,243
4.04.01	Sesuai Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa				990,122,083,465				991,227,011,708	1,104,928,243
4.04.01.02	Sesuai Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa (PKKD)				990,122,083,465				991,227,011,708	1,104,928,243
4	PENDAPATAN				990,122,083,465				991,227,011,708	1,104,928,243
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				124,092,504,605				124,092,504,605	-
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				10,535,000,000				10,535,000,000	-
4.1.1.01	Pajak Hotel				550,000,000				550,000,000	-
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage				550,000,000				550,000,000	-
	- Pajak Hotel / Cottage	1	Thn	550,000,000	550,000,000	1	Thn	550,000,000	550,000,000	-
4.1.1.02	Pajak Restoran				670,000,000				670,000,000	-
4.1.1.02.01	Restoran				670,000,000				670,000,000	-
	- Restoran	1	Thn	670,000,000	670,000,000	1	Thn	670,000,000	670,000,000	-
4.1.1.03	Pajak Hiburan				25,000,000				25,000,000	-
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga				25,000,000				25,000,000	-
	- Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	1	Thn	25,000,000	25,000,000	1	Thn	25,000,000	25,000,000	-
4.1.1.04	Pajak Reklame				300,000,000				300,000,000	-
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron				300,000,000				300,000,000	-
	- Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	1	Thn	300,000,000	300,000,000	1	Thn	300,000,000	300,000,000	-
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan				5,500,000,000				5,500,000,000	-
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				5,500,000,000				5,500,000,000	-
	- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1	Thn	5,500,000,000	5,500,000,000	1	Thn	5,500,000,000	5,500,000,000	-
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C				270,000,000				270,000,000	-
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya				270,000,000				270,000,000	-
	- Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1	Thn	270,000,000	270,000,000	1	Thn	270,000,000	270,000,000	-
4.1.1.07	Pajak Parkir				50,000,000				50,000,000	-
4.1.1.07.01	Pajak Parkir				50,000,000				50,000,000	-
	- Pajak Parkir	1	Thn	50,000,000	50,000,000	1	Thn	50,000,000	50,000,000	-
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah				30,000,000				30,000,000	-
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah				30,000,000				30,000,000	-

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			PERTAMBAH / (BERKURANG)		
		VOL	SATUAN	HARGA	VOL	SATUAN	HARGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Pajak Air Bawah Tanah	1	Thn	30,000,000	30,000,000	1	Thn	30,000,000	30,000,000	-
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet				40,000,000				40,000,000	-
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet				40,000,000				40,000,000	-
	- Pajak Sarang Burung Walet	1	Thn	40,000,000	40,000,000	1	Thn	40,000,000	40,000,000	-
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				1,700,000,000				1,700,000,000	-
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan				1,700,000,000				1,700,000,000	-
	- PBB Sektor Perkotaan	1	Thn	1,700,000,000	1,700,000,000	1	Thn	1,700,000,000	1,700,000,000	-
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				1,400,000,000				1,400,000,000	-
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak				1,400,000,000				1,400,000,000	-
	- BPHTB - Pemindahan Hak	1	Thn	1,400,000,000	1,400,000,000	1	Thn	1,400,000,000	1,400,000,000	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				5,943,605,550				5,943,605,550	-
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum				2,701,485,550				2,701,485,550	-
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas				1,172,985,550				1,172,985,550	-
	- Retribusi Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa	1	Thn	13,077,550	13,077,550	1	Thn	13,077,550	13,077,550	-
	- Pemeriksaan Laboratorium Jamaah Haji	1	Thn	2,436,000	2,436,000	1	Thn	2,436,000	2,436,000	-
	- Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Kota	1	Thn	150,870,000	150,870,000	1	Thn	150,870,000	150,870,000	-
	- Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Timur	1	Thn	300,000,000	300,000,000	1	Thn	300,000,000	300,000,000	-
	- Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Barat	1	Thn	382,530,000	382,530,000	1	Thn	382,530,000	382,530,000	-
	- Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Baro	1	Thn	194,700,000	194,700,000	1	Thn	194,700,000	194,700,000	-
	- Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Lama	1	Thn	129,372,000	129,372,000	1	Thn	129,372,000	129,372,000	-
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				250,000,000				250,000,000	-
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL, Perusahaan/Tempat Usaha dan lain lain)	1	Thn	250,000,000	250,000,000	1	Thn	250,000,000	250,000,000	-
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum				600,000,000				600,000,000	-
	- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1	Thn	600,000,000	600,000,000	1	Thn	600,000,000	600,000,000	-
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				500,000,000				500,000,000	-
	- Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1	Thn	500,000,000	500,000,000	1	Thn	500,000,000	500,000,000	-
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus				1,500,000				1,500,000	-
	- Retribusi PKB - Mobil Penumpang	1	Thn	1,500,000	1,500,000	1	Thn	1,500,000	1,500,000	-
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus				17,000,000				17,000,000	-
	- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	1	Thn	17,000,000	17,000,000	1	Thn	17,000,000	17,000,000	-
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck				28,000,000				28,000,000	-
	- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	1	Thn	28,000,000	28,000,000	1	Thn	28,000,000	28,000,000	-
4.1.2.01.35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran				7,000,000				7,000,000	-

KODE REKENING	URAIAN	SEMESTER PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		VOL	SATUAN	HARGA	BLAH	VOL	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi				14,000,000				14,000,000	
	- Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi (Pengujian Kapal Perikanan)	1	Thn	9,000,000				9,000,000	9,000,000	
	- Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi (SIPJ (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7GT))	1	Thn	5,000,000				5,000,000	5,000,000	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				518,845,242				518,845,242	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				518,845,242				518,845,242	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				518,845,242				518,845,242	
	- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1	Thn	518,845,242				518,845,242	518,845,242	
4.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah				2,100,000,000				2,100,000,000	
4.1.4.01	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah				2,100,000,000				2,100,000,000	
4.1.4.01.01	Penerimaan Zakat				2,100,000,000				2,100,000,000	
	- Penerimaan Zakat	1	Thn	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				104,995,053,813				104,995,053,813	
4.1.5.02	Penerimaan Jasa Giro				800,000,000				800,000,000	
4.1.5.02.01	Jasa Giro Kas Daerah				800,000,000				800,000,000	
	- Jasa Giro Kas Daerah	1	Thn	800,000,000				800,000,000	800,000,000	
4.1.5.03	Penerimaan Bunga Deposito				800,000,000				800,000,000	
4.1.5.03.01	Rekening Deposito Pada Bank				800,000,000				800,000,000	
	- Penerimaan Deposito Bank	1	Thn	800,000,000				800,000,000	800,000,000	
4.1.5.16	Pendapatan BLUD				90,000,000,000				90,000,000,000	
4.1.5.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD				90,000,000,000				90,000,000,000	
	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1	Thn	90,000,000,000				90,000,000,000	90,000,000,000	
4.1.5.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya				300,000,000				300,000,000	
4.1.5.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya				300,000,000				300,000,000	
	- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1	Thn	300,000,000				300,000,000	300,000,000	
4.1.5.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN				13,095,053,813				13,095,053,813	
4.1.5.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN				13,095,053,813				13,095,053,813	
	- Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Kota	1	Thn	4,654,782,000				4,654,782,000	4,654,782,000	
	- Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Timur	1	Thn	1,002,503,813				1,002,503,813	1,002,503,813	
	- Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Barat	1	Thn	2,900,676,000				2,900,676,000	2,900,676,000	
	- Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Baro	1	Thn	2,708,268,000				2,708,268,000	2,708,268,000	
	- Dana Kapitasi JKN Puskesmas Langsa Lama	1	Thn	1,828,824,000				1,828,824,000	1,828,824,000	
4.2	DANA PERIMBANGAN				648,188,339,031				648,188,339,031	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				20,667,387,031				20,667,387,031	
									649,293,267,274	1,104,928,243
									21,772,315,274	1,104,928,243

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
		VOL	SATUAN	HARGA	VOL	SATUAN	HARGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.3.02.03	Tunjangan Profesi Guru									
	- Tunjangan Profesi Guru	1	Thn	42,697,110,000	42,697,110,000	1	Thn	42,697,110,000	42,697,110,000	-
4.2.3.02.04	Tambahan Penghasilan Guru									
	- Tambahan Penghasilan Guru	1	Thn	1,236,000,000	1,236,000,000	1	Thn	1,236,000,000	1,236,000,000	-
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan									
	- Bantuan Operasional Kesehatan	1	Thn	2,533,787,000	2,533,787,000	1	Thn	2,533,787,000	2,533,787,000	-
4.2.3.02.07	Akreditasi Puskesmas									
	- Akreditasi Puskesmas	1	Thn	640,990,000	640,990,000	1	Thn	640,990,000	640,990,000	-
4.2.3.02.08	Jaminan Persalinan									
	- Jaminan Persalinan	1	Thn	978,022,000	978,022,000	1	Thn	978,022,000	978,022,000	-
4.2.3.02.09	Bantuan Operasional KB									
	- Bantuan Operasional KB	1	Thn	291,100,000	291,100,000	1	Thn	291,100,000	291,100,000	-
4.2.3.02.10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan									
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Thn	734,415,000	734,415,000	1	Thn	734,415,000	734,415,000	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH									
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi									
	- Dana Bagi Hasil Pajak Kendaran Bermotor	1	Thn	3,173,661,984	3,173,661,984	1	Thn	3,173,661,984	3,173,661,984	-
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor									
	- Dana Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	Thn	3,629,766,078	3,629,766,078	1	Thn	3,629,766,078	3,629,766,078	-
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor									
	- Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	Thn	6,622,875,379	6,622,875,379	1	Thn	6,622,875,379	6,622,875,379	-
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan									
	- Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	1	Thn	47,345,071	47,345,071	1	Thn	47,345,071	47,345,071	-
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok									
	- Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	1	Thn	6,458,648,752	6,458,648,752	1	Thn	6,458,648,752	6,458,648,752	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus									
4.3.4.01	Dana Penyesuaian									
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah									
	- Dana Insentif Daerah	1	Thn	51,569,000,000	51,569,000,000	1	Thn	51,569,000,000	51,569,000,000	-
4.3.4.01.06	Pendapatan Transfer Dana Desa APBN									
	- Pendapatan Transfer Dana Desa APBN	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000	1	Thn	54,171,651,000	54,171,651,000	-

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG		
		VOL	SATUAN	HARGA	ILAIH	VOL	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				92,168,291,565				92,168,291,565	-
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi				92,168,291,565				92,168,291,565	-
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Aceh				92,168,291,565				92,168,291,565	-
	- Bantuan Keuangan Dari Provinsi (Otonomi Khusus 2017)	1	Thn	92,168,291,565		1	Thn	92,168,291,565		
5	BELAJA				20,772,308,115				21,877,236,358	1,104,928,243
4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa				20,130,331,615				21,135,309,858	1,004,928,243
5.1	BELAJA, TIDAK LANGSUNG				16,665,381,615				16,970,309,858	304,928,243
5.1.1	Belanja Pegawai				16,665,381,615				16,970,309,858	304,928,243
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				14,579,340,545				14,884,268,788	304,928,243
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				4,485,324,104				4,645,856,415	161,532,311
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi									
	- Golongan IV : 4 Org	14	Bln	18,043,537	252,609,518	14	Bln	18,765,278	262,713,892	10,104,374
	- Golongan III : 75 Org	14	Bln	237,180,947	3,320,533,258	14	Bln	245,482,280	3,436,751,920	116,218,662
	- Golongan II : 21 Org	14	Bln	55,266,264	773,727,696	14	Bln	57,476,914	804,676,796	30,949,100
	- Golongan I : 1 Org	14	Bln	2,053,844	28,753,816	14	Bln	2,135,997	29,903,958	1,150,142
	- Acres	1	Thn	109,699,816	109,699,816	1	Thn	112,809,849	112,809,849	3,110,033
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				405,439,269				444,868,184	39,428,915
	Tunjangan Keluarga									
	- Golongan IV	13	Bln	2,642,388	34,351,044	13	Bln	2,899,359	37,691,667	3,340,623
	- Golongan III	13	Bln	21,802,590	283,433,670	13	Bln	23,922,891	310,997,583	27,563,913
	- Golongan II	13	Bln	5,713,883	74,280,479	13	Bln	6,269,557	81,504,241	7,223,762
	- Golongan I	13	Bln	268,101	3,485,313	13	Bln	294,173	3,824,249	338,936
	- Acres	1	Thn	9,888,763	9,888,763	1	Thn	10,850,444	10,850,444	961,681
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				274,002,482				300,649,203	26,646,721
	Tunjangan Jabatan									
	- Golongan IV	13	Bln	6,247,500	81,217,500	13	Bln	6,855,069	89,115,897	7,898,397
	- Golongan III	13	Bln	14,315,538	186,101,994	13	Bln	15,707,723	204,200,399	18,098,405
	- Acres	1	Thn	6,682,988	6,682,988	1	Thn	7,332,907	7,332,907	649,919
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				210,116,302				238,271,854	28,155,552
	Tunjangan Fungsional Umum									
	- Golongan III	13	Bln	11,296,385	146,853,005	13	Bln	12,810,100	166,531,300	19,678,295
	- Golongan II	13	Bln	4,274,308	55,566,004	13	Bln	4,847,064	63,011,832	7,445,828
	- Golongan I	13	Bln	197,885	2,572,505	13	Bln	224,401	2,917,213	344,708
	- Acres	1	Thn	5,124,788	5,124,788	1	Thn	5,811,509	5,811,509	686,721
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				257,208,683				294,375,356	37,166,653

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		VOL	SATUAN	HARGA	MUAB	VOI	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				3,465,000,000				4,165,000,000	700,000,000
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				3,225,000,000				3,925,000,000	700,000,000
	Sedan								700,000,000	700,000,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Sedan					1	Unit	700,000,000	700,000,000	700,000,000
	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain				3,225,000,000				3,225,000,000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Sport Utility Vehicle (SUV)	4	Unit	335,000,000	1,340,000,000	4	Unit	335,000,000	1,340,000,000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Medium Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit	545,000,000	545,000,000	1	Unit	545,000,000	545,000,000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Full Size Sport Utility Vehicle (SUV)	2	Unit	670,000,000	1,340,000,000	2	Unit	670,000,000	1,340,000,000	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				240,000,000				240,000,000	
	Pick Up				240,000,000				240,000,000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Pick Up	1	Unit	240,000,000	240,000,000	1	Unit	240,000,000	240,000,000	
4.01.4.01.04	Sekretariat DPR Kota Langsa				641,926,500				741,926,500	100,000,000
4.01.4.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan				641,926,500				741,926,500	100,000,000
5.2	BELANJA LANGSUNG				641,926,500				741,926,500	100,000,000
5.2.1	Belanja Pegawai				95,926,500				95,926,500	
5.2.1.01	Honorarium PNS				85,926,500				85,926,500	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				85,926,500				85,926,500	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				29,197,500				29,197,500	
	- Ketua	15	Org/Bln/Kej	255,000	3,825,000	15	Org/Bln/Kej	255,000	3,825,000	
	- Sekretaris	15	Org/Bln/Kej	170,000	2,550,000	15	Org/Bln/Kej	170,000	2,550,000	
	- Anggota Gol III keatas	75	Org/Bln/Kej	127,500	9,562,500	75	Org/Bln/Kej	127,500	9,562,500	
	- Anggota Gol I,II dan Honorer	120	Org/Bln/Kej	110,500	13,260,000	120	Org/Bln/Kej	110,500	13,260,000	
	Honorarium Panitia Pengamanan Pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan				52,785,000				52,785,000	
	- Ketua	15	Org/Bln/Kej	255,000	3,825,000	15	Org/Bln/Kej	255,000	3,825,000	
	- Sekretaris	15	Org/Bln/Kej	170,000	2,550,000	15	Org/Bln/Kej	170,000	2,550,000	
	- Anggota	420	Org/Bln/Kej	110,500	46,410,000	420	Org/Bln/Kej	110,500	46,410,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Rapat Pelantikan Walikota Langsa Periode 2017-2022				2,082,500				2,082,500	
	- Ketua	1	Org/Bln	255,000	255,000	1	Org/Bln	255,000	255,000	
	- Sekretaris	1	Org/Bln	170,000	170,000	1	Org/Bln	170,000	170,000	
	- Anggota	13	Org/Bln	127,500	1,657,500	13	Org/Bln	127,500	1,657,500	
	Honorarium Panitia Pengamanan Rapat Pelantikan Walikota Langsa Periode 2017-2022				1,861,500				1,861,500	
	- Ketua	1	Org/Bln	255,000	255,000	1	Org/Bln	255,000	255,000	
	- Sekretaris	1	Org/Bln	170,000	170,000	1	Org/Bln	170,000	170,000	
	- Anggota	13	Org/Bln	110,500	1,436,500	13	Org/Bln	110,500	1,436,500	
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai				10,000,000				10,000,000	

KODE REKENING	URAJAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)				
	1	2	VOL	SATUAN	HARGA	6	VOL	SATUAN		HARGA	9	JUMLAH	10
5.2.1.06.03		Honorarium Tenaga Pendukung Lainnya				10,000,000					10,000,000		-
		Honorarium Tenaga Pendukung Lainnya				10,000,000					10,000,000		-
		- Petugas MC, Pengajian, Saritilawah, Dirigen, Pengukuh Sumpah dan Doa	1	Thn	10,000,000	10,000,000	1	Thn		10,000,000	10,000,000		-
5.2.2		Belanja Barang dan Jasa				546,000,000					646,000,000		100,000,000
5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis				15,000,000					15,000,000		-
5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor				15,000,000					15,000,000		-
		Belanja Alat Tulis Kantor				15,000,000					15,000,000		-
		- Biaya Alat Tulis Kantor	1	Thn	15,000,000	15,000,000	1	Thn		15,000,000	15,000,000		-
5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor				10,000,000					20,000,000		10,000,000
5.2.2.03.13		Belanja Jasa Pengamanan				10,000,000					20,000,000		10,000,000
		Belanja Jasa Pengamanan				10,000,000					20,000,000		10,000,000
		- Biaya Jasa Pengamanan	1	Keg	10,000,000	10,000,000	1	Keg		20,000,000	20,000,000		10,000,000
5.2.2.06		Belanja Cetak dan Penggandaan				60,000,000					70,000,000		10,000,000
5.2.2.06.01		Belanja Cetak				35,000,000					45,000,000		10,000,000
		Belanja Cetak				35,000,000					45,000,000		10,000,000
		- Biaya Cetak Risalah Sidang, Notulen Pannus	1	Thn	25,000,000	25,000,000	1	Thn		25,000,000	25,000,000		-
		- Biaya Cetak Dokumentasi Hasil Sidang Dewan	1	Thn	10,000,000	10,000,000	1	Thn		10,000,000	10,000,000		-
		- Biaya Cetak Undangan Pelantikan				-					10,000,000		10,000,000
5.2.2.06.02		Belanja Penggandaan				25,000,000					25,000,000		-
		Belanja Penggandaan				25,000,000					25,000,000		-
		- Biaya Penggandaan	125,000	Lbr	200	25,000,000	125,000	Lbr	200		25,000,000		-
5.2.2.10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				36,000,000					61,000,000		25,000,000
5.2.2.10.01		Belanja Sewa Meja Kursi				6,000,000					6,000,000		-
		Belanja Sewa Meja Kursi				6,000,000					6,000,000		-
		- Biaya Sewa Meja Kursi	1	Keg	6,000,000	6,000,000	1	Keg		6,000,000	6,000,000		-
5.2.2.10.05		Belanja Sewa Tenda				20,000,000					35,000,000		15,000,000
		Belanja Sewa Tenda				20,000,000					35,000,000		15,000,000
		- Biaya Sewa Tenda	1	Keg	10,000,000	10,000,000	1	Keg		20,000,000	20,000,000		10,000,000
		- Biaya Sewa Dekorasi	1	Keg	10,000,000	10,000,000	1	Keg		15,000,000	15,000,000		5,000,000
5.2.2.10.07		Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Studio Audio/Visual				10,000,000					20,000,000		10,000,000
		Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Studio Audio/Visual				10,000,000					20,000,000		10,000,000
		- Biaya Sewa Televisi	1	Keg	10,000,000	10,000,000	1	Keg		10,000,000	10,000,000		-
		- Biaya Sewa Sound Systemi				-					10,000,000		10,000,000
5.2.2.11		Belanja Makanan dan Minuman				220,000,000					275,000,000		55,000,000

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
		VOI	SATUAN	HARGA	VOI	SATUAN	HARGA		JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				160,000,000				160,000,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				160,000,000				160,000,000	-
	- Biaya Makanan dan Minuman Rapat	1	Thn	160,000,000	160,000,000	1	Thn	160,000,000	160,000,000	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas				60,000,000				115,000,000	55,000,000
	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas				60,000,000				115,000,000	55,000,000
	- Biaya Makanan dan Minuman Peserta/Panitia/Petugas	1	Keg	60,000,000	60,000,000	1	Keg	115,000,000	115,000,000	55,000,000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				205,000,000				205,000,000	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				205,000,000				205,000,000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				205,000,000				205,000,000	-
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peninjauan Lapangan dan Pansus Dewan	1	Thn	120,000,000	120,000,000	1	Thn	120,000,000	120,000,000	-
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendamping dan ADC	1	Thn	85,000,000	85,000,000	1	Thn	85,000,000	85,000,000	-
	SURPLUS / (DEFISIT)				969,349,775,350				969,349,775,350	

WALIKOTA LANGSA, K

Usm

USMAN ABDULLAH